Kasus Korupsi Gidot

30 Dewan Diperiksa KPK

PONTIANAK, SP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkayang di Mapolda Kalbar, Selasa (26/11). Dari informasi yang dihimpun jumlahnya mencapai 30 orang. Selain anggota DPRD yang kini menjabat, mantan legislator Bengkayang periode 2014-2019 turut dipanggil.

Mereka diperiksa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2019. Keterangan mereka diperlukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi gratifikasi proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten

• Baca Halaman 7

Bengkayang, di mana Bupati Suryadman Gidot ditangkaptangan KPK awal September lalu.

Pemeriksaan terhadap mantan anggota DPRD periode 2014-2019 dan wakil rakyat yang kini menjabat dimulai Selasa (26/11). Petugas KPK memanggil mereka maraton yang dijadwalkan hingga Jumat (29/11).

Wakil Ketua DPRD Bengkayang, Esidorus membenarkan adanya undangan pemanggilan terhadap sejumlah anggota dewan Bengkayang oleh KPK. Dia sendiri dijadwalkan datang Rabu (27/11) hari ini pukul 10.00 WIB.

"(Dipanggil) terkait APBD Perubahan, saya rasa semua anggota diminta keterangan," katanya, Selasa (26/11).

Para anggota DPRD dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Politisi PDI-Perjuangan itu mengaku akan kooperatif memenuhi undangan dan siap memberi keterangan.

Di sisi lain, Esi—panggilan akrabnya—berharap pengusutan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Bengkayang segera selesai. Alasannya tak lain agar semua pihak bisa fokus melayani masyarakat dan bekerja membenahi Bengkayang.

"Semua bekerja secara profesional dan proporsional, mengabdikan diri dengan penuh dedikasi," harapnya.

Harapan tersebut bukan tanpa alasan. Pengungkapan rentetan kasus korupsi yang terjadi di Bengkayang dirasa sangat mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten.

"ASN kita ketakutan dan trauma melaksanakan tugas, program dan kegiatan banyak yang tidak dapat dilaksanakan, semangat dan etos kerja menurun," sebutnya.

Anggota DPRD Bengkayang, Tony Pangeran pun menyatakan hal sama. Pemanggilan para legislator daerah itu terkait dengan dugaan korupsi Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot.

"Iya memang benar ada pemanggilan," kata dia.

Sebagaimana Wakil Ketua DPRD, Tony juga dipanggil ke Polda Kalbar Rabu ini.

"Benar saya dipanggil, tapi jadwal pemanggilan saya besok (hari ini), Rabu (27/11). Saya diundang sebagai saksi," jelas legislator Partai Golkar ini.

Perihal siapa saja yang diperiksa Selasa (26/11), Tony tak tahu pasti. Termasuk untuk unsur pimpinan DPRD Bengkayang periode lalu.

"Kalau itu kabarnya simpang siur, saya tidak bisa pastikan itu," sebutnya.

Sebagaimana diketahui, APBD Perubahan 2019 dibahas anggota DPRD Bengkayang periode 2014-2019. Di periode itu, Martinus Kajot menjabat ketua, dengan wakil Fransiskus dan Yosua Sugara. Sementara unsur pimpinan baru diisi oleh Fransiskus sebagai ketua, serta Jonedhi dan Esidorus sebagai wakil.

Suara Pemred mengonfirmasi Martinus Kajot dan Fransiskus. Namun nomor telepon keduanya tak aktif. Sedang Yosua Sugara hanya membaca pesan WhatsApp yang dikirim tanpa meresponnya.

Perihal pemeriksaan, Polda Kalbar tak ambil bagian. Pihaknya hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan. Sedang materi dan isinya, kewenangan KPK.

"Sudah sejak Senin kemarin, KPK menggunakan ruangan di Ditreskrimsus untuk memeriksa," kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go.

Pada Senin (25/11), KPK menglarifikasi tujuh saksi terkait alokasi dana untuk Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot (SG). Mereka diperiksa untuk tersangka Nelly Margaretha (NM) dari unsur swasta.

"Pada para saksi didalami terkait rapat pembahasan penambahan anggaran Dinas PU dan Dinas Pendidikan serta rencana alokasi dana untuk SG dan tentang audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Pemkab Bengkayang," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Ketujuh saksi itu adalah Wakil Bupati Bengkayang Agustinus Naon, Sekretaris Inspektorat Bengkayang Damianus, Plt Kepala Dinas Perikanan Kelautan Bengkayang Syarifudin, Kepala Sub Bagian Renja dan Keuangan Dinas PUPR Bengkayang Yoel Yudi.

Selanjutnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Bengkayang Hery Pitriadi, Kepala Bidang Tata Ruang Survei Pemetaan dan Tata Kota Dinas PUPR Bengkayang Kurniawan Mamanda S, dan Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Bengkayang Yayat Sutiawan.

Tujuh Tersangka

KPK total telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima suap, yakni Suryadman Gidot dan Kepala Dinas PUPR Bengkayang Aleksius (AKS). Sedangkan sebagai pemberi suap, yaitu unsur swasta masing-masing Rodi (RD), Yosef (YF), Bun Si Fat (BF), Nelly Margaretha (NM), dan Pandus (PS).

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa Suryadman meminta uang kepada Aleksius. Permintaan uang tersebut dilakukan Suryadman atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp6 miliar.

Suryadman diduga meminta uang kepada Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Agustinus Yan, masing-masing sebesar Rp300 juta. Namun dalam sidang terakhir, Senin kemarin terungkap total permintaan Rp1 Miliar.

Menindaklanjuti hal tersebut, Aleksius menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal. Hal itu dilakukan dikarenakan uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan dari bupati.

Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung dimintakan setoran sebesar Rp20-25 juta atau minimal sekitar 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp200 juta.

Kemudian, Aleksius menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati "*fee*" sebagaimana disebut sebelumnya, terkait paket pekerjaan penunjukan langsung melalui staf honorer pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Fitri Julihardi (FJ).

Rinciannya sebagai berikut, pertama Rp120 juta dari Bun Si Fat, Rp160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi serta Rp60 juta dari Nelly Margaretha.

Dalam kegiatan tangkap tangan kasus tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa ponsel, buku tabungan, dan uang sebesar Rp336 juta dalam bentuk pecahan Rp100 ribu. (**ant/nar/sms/bls**)

DPRD
KABUPATEN
BENGKAYANG
KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi
Esidorus
Wakil Ketua DPRD Bengkayang
(Dipanggil) terkait APBD Perubahan, saya rasa semua anggota diminta keterangan.